

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah ketahanan pangan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang konstan sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan. Peningkatan kebutuhan pangan ini didorong oleh pendapatan yang lebih tinggi, kesadaran akan kesehatan, dan perubahan pola makan akibat pengaruh globalisasi, serta berbagai aktivitas masyarakat.¹ sementara itu, ketersediaan lahan semakin berkurang karena banyaknya pembangunan dan penggunaan lahan untuk keperluan non-pangan.

Permasalahan ketahanan pangan berhubungan dengan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Pada hal ketersediaan pangan di Indonesia, kita dihadapkan pada masalah seperti terjadinya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, terbatasnya persediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan dan rusaknya pengairan serta menurunnya kualitas dan kesuburan tanah akibat kerusakan lingkungan. Pada distribusi pangan masih sering terjadi hambatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang memicu naik turunnya harga pangan dan daya beli masyarakat.

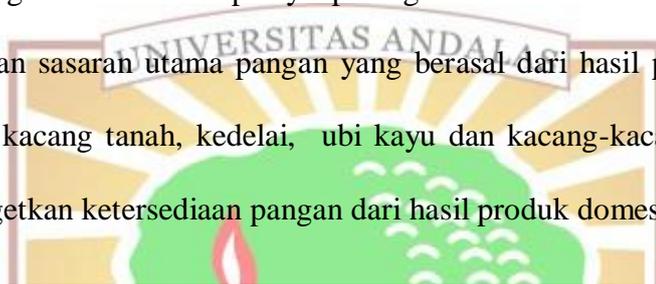
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen fundamental bagi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.² Dalam hal ini negara

¹ Purwaningsih, yunastiti. "Ketahanan Pangan: situasi, permasalahan, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 09 No. 1 Juni 2008. Hlm 1-27

² Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan asupan pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang pada tingkat nasional dan perseorangan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ketahanan pangan merupakan keadaan tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, aman, adil bagi negara sampai ke perseorangan untuk hidup aktif, sehat dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan secara nasional, dengan sasaran utama pangan yang berasal dari hasil pertanian seperti beras, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu dan kacang-kacangan, ubi jalar, dengan menargetkan ketersediaan pangan dari hasil produk domestik



Ketahanan sosial, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan ketahanan nasional merupakan hal yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Tidak hanya itu, ketahanan pangan juga erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tanpa adanya dukungan pangan yang memadai dan bermutu, mustahil untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga perlu membangun sistem ketahanan pangan yang kuat untuk menjadi prasyarat mutlak dalam pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menangani masalah ketahanan pangan, hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tentang pangan dan ketahanan pangan seperti Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Permentan No. 15 Tahun 2013 tentang Program Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan tahun Anggaran 2013 dan masih banyak peraturan lainnya yang terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan.

Saat ini, ketahanan pangan Indonesia berada pada situasi dimana konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang kualitasnya kurang beragam dan bergizi seimbang. Mengingat konsumsi pangan dengan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan kecerdasan manusia. Dalam kaitan ini, salah satu pilar untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan dengan penganekaragaman pangan.

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu gizi pangan melalui pola konsumsi yang lebih beragam atau melalui upaya lebih lanjut peningkatan mutu gizi pangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, penganekaragaman pangan menjadi salah satu ruang lingkup kebijakannya, sebab menjadi upaya untuk peningkatan ketersediaan pangan beragam dan berbasis sumber daya lokal untuk.³

- a. Memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
- b. Mengembangkan usaha pangan; dan/ atau
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan aturan penganekaragaman pangan berpedoman pada prinsip gizi seimbang, berbasis sumber daya dan kearifan lokal, ramah lingkungan dan aman.

³ Ibid., pasal 25.

Prinsip gizi seimbang diukur dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan adalah metode yang digunakan untuk menilai komposisi dan jumlah makanan yang tersedia.⁴

Skor pola pangan harapan menjadi parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan atas ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk suatu daerah dalam waktu tertentu. Pola pangan harapan merupakan susunan keberagaman pangan berdasarkan asupan energi baik secara relatif maupun absolut terhadap energi total, baik dari ketersediaan maupun konsumsi pangan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, agama dan cita rasa. Dan skor pola pangan harapan ini menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan.

Dalam rangka pencapaian Skor PPH sebagai wujud pemenuhan pola konsumsi pangan yang B2SA, Kementerian Pertanian Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sejak tahun 2010. Program ini adalah perwujudan dari Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan untuk implementasinya dalam bentuk peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Menteri Pertanian No 15 Tahun 2013 tentang Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan tahun Anggaran 2013. Program ini diturunkan ke kelembagaan tingkat daerah dengan nomenklatur yang berbeda – beda, salah satunya menjadi Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

⁴ Ibid., pasal 27 penjelasan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan merupakan program yang dilaksanakan secara nasional dan salah satu provinsi yang melaksanakannya adalah provinsi Sumatera Barat. Program Ini telah terlaksana di seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang Panjang. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam wawancara berikut:

“Program peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan di setiap daerah sebab Pangan merupakan kewajiban negara yang diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana pangan harus dipenuhi untuk seluruh masyarakat, bermasalah atau tidaknya pangan, program peningkatan ketahanan pangan tetap dijalankan di setiap daerah termasuk Kota Padang Panjang” (wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Bapak Deslirizaldi, SP, MP pada Jumat 02 Oktober 2020 pukul 09.00)

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa program peningkatan ketahanan pangan ini dilaksanakan di setiap daerah termasuk kota Padang Panjang. Program ini bertujuan untuk mewujudkan Undang-undang No. 18 tahun 2012 yang menyatakan pangan sebagai hak asasi manusia negara wajib untuk memenuhinya, dengan mewujudkan ketersediaan pangan, pemenuhan konsumsi pangan yang B2SA, serta distribusi pangan serta memberdayakan masyarakat dalam hal pangan dan terciptanya kebijakan daerah mengenai ketahanan pangan

Kondisi pangan di Kota Padang Panjang saat ini mengalami keadaan kerawanan pangan. Kerawanan pangan diakibatkan karena terjadinya pengalihan fungsi lahan menjadi non pertanian yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sehingga berakibat pada penurunan tingkat produksi pertanian.

Berikut tabel sebaran luas lahan panen produktivitas padi di Kota Padang Panjang tahun 2014-2018:

Tabel 1. 1 Luas Lahan Panen Produktivitas Padi di Kota Padang Panjang Tahun 2014 – 2018

No.	Tahun	Luas Panen Produktivitas Padi (Ha)
1	2014	1.625
2	2015	1.687
3	2016	1.794
4	2017	1.814
5	2018	805

Sumber: BPS Sumatera Barat 2019 (*olahan Peneliti*)

Dari uraian tabel 1.1 diatas, diketahui kota Padang Panjang setiap tahunnya mengalami penurunan luas lahan padi dimana pada tahun 2014 luas lahan panen mencapai 1.625 ha dan pada tahun 2018 luas lahan hanya berkisar 805 ha yang mana artinya ada pengalihan fungsi lahan menjadi non pertanian selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 adalah 820 ha. Adanya alih fungsi lahan menjadi non pertanian ini tentu saja mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Padang Panjang. Pengalihan lahan pertanian menjadi non pertanian mengakibatkan produksi pangan di Kota Padang Panjang menjadi terganggu yang disertai dengan pengaruh kepada ketersediaan pangan. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“...Untuk produksi pangan sendiri sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika sudah dibantu daerah lain, ketersediaan pangan masyarakat baru bisa tercukupi.” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni,S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat kondisi ketersediaan pangan di Kota Padang Panjang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang semakin menipis akibat pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga hasil produksi panen sendiri belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Namun kebutuhan tersebut dapat ditutupi dengan adanya bantuan dari daerah lain yang berada di sekitar Kota Padang Panjang sehingga dalam hal ketersediaan masih sering bergantung pada daerah lain. Hal ini tentu saja menjadi perhatian sebab ketergantungan ketersediaan pangan pada daerah lain tentu akan mengakibatkan pada naik turunnya produksi pangan dan akan mempengaruhi naik turunnya harga pangan dan naik turunnya daya beli.

Adanya bantuan ketersediaan pangan dari daerah lain ini, dikarenakan kondisi wilayah Padang Panjang yang berada pada jalur silang dan terhubung dengan lintas Sumatera. Menjadikan kota ini berada pada posisi yang cukup strategis dikarenakan letaknya yang berada pada lintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, juga dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Solok. Sehingga pada saat hari balai/ hari pasar Kota Padang Panjang yakni Senin dan Jumat, para petani dari kota dan kabupaten tersebut akan menjualkan hasil produksi panen mereka di pasar pusat padang panjang.

Gambar 1. 1 Peta Jalan di Sumatera Barat



Sumber: *id. Pinterest.com*

Kondisi ini juga disampaikan Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“Dalam hal ketersediaan pangan, sudah cukup tersedia karena selain produksi sendiri, Padang Panjang kan terletak ditengah Sumatera Barat atau lintas sektor sehingga mudah diakses daerah lain, banyak daerah lain yang menjual pangannya ke Padang Panjang seperti beras sayuran dll..” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni, S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan dari gambar 1.1 Peta Jalan di Sumatera Barat dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ketersediaan pangan di Kota Padang Panjang sangat bergantung pada daerah lain diakibatkan karena tidak tercukupinya hasil produksi panen untuk kebutuhan masyarakat. Letak wilayah Kota Padang Panjang yang berada pada lintas sektor sangat membantu dalam ketersediaan pangan Kota Padang Panjang dan berakibat pada ketergantungan pada daerah lain dalam hal ketersediaan pangan.

Selain masalah ketersediaan pangan, terdapat hambatan distribusi pangan terhadap keterjangkauan atau aksesibilitas pangan yang ditentukan oleh daya beli dan harga bahan baku pangan. Terdapat hubungan negatif antara harga pangan dan daya beli masyarakat. Harga yang meningkat pada pendapatan tetap, maka daya beli menurun, sebaliknya apabila harga turun dan pendapatan masyarakat tetap maka daya beli akan meningkat.⁵ Pada distribusi pangan masih sering terjadi hambatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang memicu naik turunnya harga pangan dan daya beli masyarakat. berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota bidang ketahanan pangan Dinas Pangan dan Pertanian mengenai harga pangan di Kota Padang Panjang:

“Naik turunnya harga pangan biasanya dipengaruhi oleh HBK (Hari Besar Keagamaan) seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dll. Terus juga selain itu, karena adanya perubahan iklim sehingga produksi panen petani jadi terganggu, ada pula karena serangan hama yang membuat hasil produksi petani menjadi sedikit bahkan gagal panen” (Wawancara dengan anggota Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ibu Elsy Mutia Handayani SP pada 22 Oktober 2020 pukul 10.00).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat kondisi distribusi pangan Kota Padang Panjang dalam ketidakstabilan. Dimana masih sering terjadi naik turunnya harga pangan yang dipengaruhi oleh adanya hari besar keagamaan dan juga perubahan iklim serta serangan hama yang membuat hasil produksi panen menjadi sedikit atau bahkan gagal. Seperti yang kita ketahui, bahwa Kota Padang Panjang mendapat julukan sebagai Kota Hujan dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan gangguan pada hasil panen petani. Selain itu,

⁵ Purwaningsih, yunastiti. “Ketahanan Pangan: situasi, permasalahan, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 09 No. 1 Juni 2008. Hlm 1-27

serangan tikus hama yang dialami petani seluas 79,5 Ha mengakibatkan kegagalan panen bagi petani.⁶

Tidak hanya pada ketersediaan pangan dan distribusi pangan, permasalahan pangan juga terjadi pada konsumsi pangan masyarakat Kota Padang Panjang. Permasalahan konsumsi penduduk yaitu belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya angka konsumsi energi (AKE) walaupun angka konsumsi protein sudah mencukupi (AKP), begitu pula yang terjadi di Kota Padang Panjang. **Konsumsi pangan sendiri** adalah upaya untuk penganekaragaman konsumsi pangan dengan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein, menganeekaragaman kualitas konsumsi pangan dengan menurunkankonsumsi beras per kapita⁷, sehingga terciptanya pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Berikut pernyataan Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengenai Konsumsi Pangan di Kota Padang Panjang:

“...Dalam hal konsumsi pangan, Padang Panjang masih kurang dalam konsumsinya sebab pola konsumsinya masih belum B2SA, padahal sudah disosialisasikan, tetapi belum direalisasikan oleh masyarakat itu sendiri” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni,S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin, 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Pernyataan diatas menyatakan jika konsumsi pangan Kota Padang Panjang masih belum menerapkan pola konsumsi yang B2SA yaitu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. Untuk itu dalam menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan di Kota Padang Panjang, dilakukanlah Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dibawah Dinas Pangan

⁶ Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2018 - 2023

⁷ Purwaningsih, yunastiti. “Ketahanan Pangan: situasi, permasalahan, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 09 No. 1 Juni 2008. Hlm 1-27

dan Pertanian Kota Padang Panjang. Program ini diimplementasikan dalam rangka memenuhi Skor Pola Pangan Harapan yang merupakan wujud terpenuhinya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang belum mencapai angka maksimal yakni 100, juga menyelesaikan masalah Konsumsi, distribusi dan ketersediaan pangan lainnya. Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“Program ini kan diuraikan dalam beberapa kegiatan yang tujuannya nanti ialah terciptanya B2SA, terciptanya ketersediaan pangan yang memadai, mudahnya masyarakat untuk mengakses pangan dalam hal distribusi serta terjangkau harga pangan” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni,S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin, 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Dari pernyataan diatas, adanya program ini bertujuan untuk terciptanya kestabilan dan menyelesaikan permasalahan pangan dalam hal ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang ada di Kota Padang Panjang. Berkaca dari aktor pelaksana program, hal yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan di Kota Padang Panjang merupakan wewenang Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan disahkan melalui Peraturan Walikota No. 27 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian. Dinas Pangan dan Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pangan dan urusan pemerintahan dibidang perikanan.⁸

⁸ Perwako Padang Panjang No 27 tahun 2019 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, Pemerintah Kota Padang Panjang memasukkan Ketahanan Pangan dalam RPJMD Kota Padang Panjang dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Pada sektor pertanian diharapkan dapat terus berkembang dalam rangka turut mensukseskan program pemerintah dalam mempertahankan swasembada beras berkelanjutan. Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2018 – 2023 Kota Padang Panjang, program nasional yang akan dijalankan salah satunya adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Untuk itu, mengenai pelaksanaan program ini peneliti membatasi penelitian dari tahun 2019 sampai saat ini.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan sudah diimplementasikan dimana yang menjadi implementornya adalah Pemerintah Kota Padang Panjang terutama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Pelaksanaan program ini menggunakan unsur kerjasama antar OPD dalam pencapaian tujuannya. Sebab ketahanan pangan merupakan salah satu cara untuk peningkatan pembangunan ekonomi daerah dan termasuk dalam isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Panjang dan hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam wawancara berikut:

“Sebenarnya untuk ketahanan pangan ini merupakan unsur koordinasi, yang mana adanya kerjasama antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, dan OPD lain untuk meningkatkan ketahanan pangan namun masih tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dari dinas masing-masing.” (Wawancara dengan Ibu Ade Nafrita Anas, SP, MP Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Rabu 28 April 2021 pukul 08.50 WIB)

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang dilaksanakan dengan adanya unsur

koordinasi antar dinas untuk meningkatkan ketahanan pangan Kota Padang Panjang. Adanya koordinasi tersebut disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing OPD. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan berperan mengawasi keamanan pangan masyarakat Kota Padang Panjang dan mensosialisasikan terkait pangan dan gizi. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan Dinas Kesehatan tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 105/ WAKO-PP/2021 tentang Tim Pembuatan Peta Ketahanan dan Kerawanan pangan. Begitu pula dengan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang berperan sebagai penyedia sarana untuk pelaku industri pangan dan tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang.

Program ini membantu tercapainya Visi dan Misi Walikota Padang Panjang serta output dalam pelaksanaannya adalah terciptanya Ranperda mengenai Ketahanan Pangan yang mana saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki peraturan mengenai Ketahanan pangan. Visi Walikota Padang Panjang adalah “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT” yang didukung oleh 3 Misi, yaitu: 1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan; 2) Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya; 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.

Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang implementor utamanya adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mendukung Misi pertama yaitu: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah

Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Dengan tujuan Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan dan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang Tangguh berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan strategi Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan arah kebijakan: 1). Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan Peningkatan produksi sub sektor peternakan dan perikanan. Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian yang mendukung secara langsung Program Walikota Padang Panjang “Gerakan Warga Berdaya Kota Berjaya” (Pemanfaatan pekarangan dan lingkungan menanam bunga, sayur, buah, pohon, beternak, berkolam, industri rumah tangga) yang termasuk kedalam Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkan konsumsi pangan yang B2SA yaitu beragam, bergizi, seimbang dan aman dilaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan 9 kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 598.292.300,- . Adapun 9 kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan:
 - a. Uji sampel pangan segar
 - b. Sosialisasi keamanan pangan dan jajanan anak sekolah
 - c. Pertemuan dewan ketahanan pangan
2. Kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan dan suplai pangan:
 - a. Buku pola pangan harapan (PPH) disusun

3. Kegiatan penyusunan sumber pangan alternatif:
 - a. Pelatihan pengolahan pangan lokal yang dilaksanakan
 - b. Cipta menu B2SA tingkat kota yang dilaksanakan
 - c. Keikutsertaan dalam peringatan hari pangan sedunia
4. Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan:
 - a. Pelatihan pemanfaatan pekarangan
5. Kegiatan pemantauan analisis harga pangan pokok:
 - a. Pemantauan harga pangan pokok di Kota Padang Panjang
 - b. Buku harga pangan pokok
6. Kegiatan pengembangan kelurahan mandiri pangan:
 - a. Monitoring dan evaluasi Nagari Mandiri Pangan
 - b. Pelatihan Nagari Mandiri Pangan
7. Kegiatan penanganan daerah rawan pangan:
 - a. Paket sembako yang diberikan
8. Kegiatan analisis ketersediaan pangan:
 - a. Buku analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2018
 - b. Buku database ketahanan pangan
9. Kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah:
 - a. Draft Ranperda

Kegiatan yang menjadi kegiatan utama dalam program ini adalah Program ini adalah Kegiatan Sumber Pangan Alternatif dan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan. Kegiatan Penyusunan Pangan Alternatif adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan terigu, sehingga masyarakat tidak

terpaku lagi pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk mengkonsumsi berbagai macam bahan pangan, sehingga akan terwujudnya pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Sedangkan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan adalah upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan yang sekiranya dapat memberikan nilai tambah untuk pemenuhan gizi dan peningkatan ekonomi keluarga dengan berbagai tanaman khususnya sayur-sayuran, buah-buahan dan toga yang secara garis besar akan lebih menghemat pengeluaran keluarga dan dapat menambah pendapatan keluarga. Dengan adanya kegiatan ini membantu untuk terciptanya kestabilan dan menyelesaikan permasalahan ketersediaan pangan, distribusi pangan serta konsumsi pangan.

Pada kegiatan Penyusunan Pangan Alternatif, Dinas Pangan dan Pertanian telah membawa Kota Padang Panjang mewakili Sumatera Barat dalam Perlombaan Cipta Menu B2SA tingkat nasional pada tahun 2019 dan meraih peringkat III dalam perlombaan tersebut. Lomba Cipta Menu B2SA memiliki tujuan agar masyarakat terbiasa untuk mengkonsumsi pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. Selain itu, masyarakat lebih inovatif untuk menghasilkan pangan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal.⁹ Berikut gambar penyerahan piagam Lomba Cipta Menu B2SA Nasional kepada Kota Padang Panjang:

⁹ <https://pariamankota.go.id/berita/juara-i-lomba-menu-b2sa-tingkat-sumbar-tp-pkk-kota-pariaman-wakili-sumbar-ke-tingkat-nasional#:~:text=Selain%20mampu%20meraih%20yang%20terbaik,dengan%20memanfaatkan%20bahan%20Bahan%20lokal.> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, 11:37 WIB)

Gambar 1. 2 Penyerahan Piagam Juara Lomba Cipta Menu B2SA di Kota Kendari Sulawesi Tenggara



Sumber: *Laporan Akhir Kegiatan Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan 2019*

Meskipun memenangkan Cipta Menu B2SA dalam perlombaan tahun 2019, ternyata masyarakat Padang Panjang belum menerapkan pola konsumsi yang B2SA sepenuhnya dan skor Pola Pangan Harapan Kota Padang Panjang masih belum mencapai pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Hal ini dapat dilihat pada Tabel Skor Pola Pangan Harapan berikut:

Tabel 1. 2Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan tahun 2018 -2020

No	Tahun	Skor Pola Pangan Harapan	
		Target	Realisasi
1	2018	84,1	85
2	2019	85	80,20
3	2020	85,5	82,32

Sumber: *LKJIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2018 dan 2019*

Berdasarkan tabel diatas pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan angka 80,20 persentase capaian sebesar 94,35%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan skor pada tahun 2018 yaitu sebesar 85,0 dengan persentase pencapaian 100%. Dengan demikian skor PPH Kota Padang Panjang tahun 2019 masih berada dibawah capaian provinsi Sumatera Barat (86,3) dan Target Nasional (88,4). Penurunan angka ini

menunjukkan bahwa masyarakat kota Padang Panjang telah menerapkan pola konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman namun belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Penurunan angka tersebut tentu saja mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang. Yang mana berdasarkan Visi dan Misi Walikota Padang Panjang pengimplementasian Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi I Walikota yakni Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Berikut tabel laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2015 - 2020:

Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang 2015 – 2020

Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Padang Panjang	5,91	5,80	5,81	5,73	5,59	-1,44

Sumber: BPS Kota Padang Panjang 2020 (*olahan peneliti*)

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang. Adanya penurunan Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2019 selaras dengan penurunan laju perekonomian Kota Padang Panjang. Oleh sebab itu, ketahanan pangan menjadi salah satu poin utama dalam RPJMD Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan dilaksanakannya Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Walikota Padang Panjang sendiri memiliki Program yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan yaitu Program Gerakan Warga Berdaya Kota Berjaya yang mana program ini dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan dan lingkungan

menanam bunga, sayur, buah, pohon, beternak, berkolam, industri rumah tangga. Program ini termasuk kedalam Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Tidak hanya program walikota, program nasional seperti KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) pun juga dilaksanakan dalam kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang juga melibatkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pelaku usaha industri olahan pangan lokal untuk menciptakan pola konsumsi B2SA yang mana dalam hal ini dilakukan dalam kegiatan Sumber Pangan Alternatif, Kelompok Wanita Tani atau KWT untuk memanfaatkan lahan pekarangan, ketersediaan pangan serta distribusi pangan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“Dalam pelaksanaan program, dinas melibatkan ibu-ibu PKK, KWT, dan Pelaku usaha industri olahan pangan lokal. Perannya itu kalo ibu PKK kan ketahanan pangan itu berhubungan dengan ibu- ibu karena ibu- ibu yang menyediakan makanan di rumah. Jadi sosialisasi pangan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi lebih diarahkan kepada PKK atau ibu- ibu nanti mereka bisa menyampaikan ke ibu-ibu yang lain agar mengkonsumsi yang B2SA, untuk pelaku usaha industri olahan pangan lokal, kami memberikan pelatihan juga sosialisasi terkait himbauan pemanfaatan pangan lokal menjadi usaha industri pangan, bagi pelaku usaha yang cuma olahan terigu kami anjurkan untuk substitusi ke non terigu...” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni,S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, sasaran dalam pelaksanaan program ini adalah PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), pelaku usaha industri olahan pangan lokal dan KWT. Adapun peran dari ibu- ibu PKK Kota Padang

Panjang adalah untuk mewujudkan pola Konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan lokal dan pengembangan menu B2SA.

Gambar 1. 3 Sosialisasi dan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Pengembangan Menu B2SA



Sumber: Laporan Akhir Kegiatan Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Namun pada pelaksanaan program, tujuan mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA masih belum dapat tercapai. Hal ini tentu berhubungan dengan hasil sosialisasi dan pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Pengembangan Menu B2SA yang diberikan kepada ibu-ibu PKK dan para pelaku usaha industri olahan pangan lokal. Hal ini disampaikan oleh Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“...Sebenarnya Sosialisasi sudah dijalankan secara gencar, Cuma kesadaran masyarakat terhadap B2SA itu masih rendah, karena dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya masyarakat contohnya, kalo nggak makan nasi sama saja nggak makan, padahal konsep B2SA itu mengurangi konsumsi beras dan ganti dengan pangan lain, terus

budaya makan Gulai, Rendang, lontong dipagi hari dll” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni,S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat hasil sosialisasi dan pelatihan pengolahan dan pengembangan menu B2SA untuk mewujudkan pola konsumsi yang B2SA masih belum bisa tercapai. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi B2SA yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya masyarakat Kota Padang Panjang yang sering memakan makanan yang berlemak. Seperti yang diketahui masyarakat Kota Padang Panjang sebagai orang minang memiliki *mindset* Nasi sebagai makanan pokok dan hal itu masih belum bisa diganti dengan pangan pokok lainnya. Tidak hanya ibu PKK dan pelaku usaha industri olahan pangan lokal, Kelompok Wanita Tani juga menjadi Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Kelompok Wanita Tani diarahkan memanfaatkan pekarangan secara optimal dengan berbagai fungsi antara lain sebagai lumbung hidup, apotik hidup, pekarangan komersial dan sebagai pasca panen. Tujuan dari diarahkannya KWT untuk kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yaitu:

1. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan dapur, tanaman obat keluarga, memelihara hewan ternak dan perikanan.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
3. Pemanfaatan pekarangan juga dapat sebagai sumber pendapatan/tabungan keluarga, dimana hasil pekarangan tidak hanya untuk makan tapi juga dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga.

Gambar 1. 4 Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan



Sumber: Laporan Akhir Kegiatan Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Adanya Kelompok Wanita Tani sebagai sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan, sejalan dengan pelaksanaan program nasional yaitu KRPL dan P2L serta Program Walikota yang masuk kedalam kegiatan tersebut. Untuk itu, terdapat bantuan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang diperuntukan untuk Kelompok Wanita Tani. Berikut daftar KWT penerima bantuan tahap Penumbuhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan kota Padang Panjang:

Tabel 1. 4 Daftar KWT Penerima Bantuan Pemerintah Tahap Penumbuhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kota Padang Panjang Tahun 2019

No	Kelompok Penerima Bantuan				
	Nama kelompok	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah dana	Sumber dana
1	KWT Matahari	Padang Panjang Timur	Ekor Lubuk	15.000.000	APBN
2	KWT Bougenvile	Padang Panjang Timur	Ekor Lubuk	15.000.000	APBN
3	KWT Tabiang	Padang Panjang	Sigando	15.000.000	APBN

	Indah	Timur			
4	KWT Puncak Silaing Indah	Padang Panjang Barat	Silaing Bawah	15.000.000	APBN
5	KWT Sidingin	Padang Panjang Timur	Ekor lubuk	15.000.000	APBN

Sumber: *Database Ketahanan Pangan, 2019*

Adanya bantuan anggaran yang diberikan pemerintah ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan. Dinas Pangan dan Pertanian dalam hal ini masih mengalami kendala dalam pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang diterima dari keluhan – keluhan kelompok wanita tani. Kondisi ini disampaikan oleh Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“Biasanya keluhan yang kami terima dari KWT, tidak semua anggota yang memiliki satu pemikiran, kadang – kadang ada anggota kelompok yang aktif ada pula yang tidak dan dalam hal ini yang akan membantu dalam penyelesaian masalah kelompok adalah penyuluh kelompok” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni,S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada pada 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan dari wawancara diatas, dapat dilihat KWT sebagai kelompok sasaran pelaksanaan program masih memiliki kendala terkait keaktifan anggota. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran para anggota dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga juga dapat sebagai sumber pendapatan/tabungan keluarga, dimana hasil pekarangan tidak hanya untuk pangan tapi juga dapat dijual sebagai sumber pendapatan keluarga.

Prinsip dari implementasi kebijakan adalah proses implementor berupaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan

dan standar kebijakan merupakan faktor krusial dalam proses implementasi. Dalam implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan, tentu saja tidak berjalan dengan lancar begitu saja tanpa ada masalah yang ditemui dilapangan. Program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya.

Van Meter dan Van Horn mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan atau program salah satunya tergantung pada bagaimana sumber daya yang ada didalamnya baik itu sumber daya manusia maupun non manusia. Terkait hal ini, peneliti menemukan fenomena yang ada dalam pelaksanaan program dimana pada sumber daya manusia terdapat keterbatasan tenaga kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian, hal ini juga diungkapkan oleh Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“Sumber daya manusia dalam dinas dirasa masih kurang dikarenakan jumlah SDM yang masih sedikit dan latar belakang Pendidikannya juga” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni, S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dikatakan sumber daya manusia dalam Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang masih kurang dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut Van Meter & Van Horn sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Adanya kendala dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pangan dan Pertanian tentu mempengaruhi keberhasilan Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Dibawah ini adalah tabel rekap pegawai di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

Tabel 1. 5 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Pendidikan							Jenis Kelamin		Jml	
		SD	SMP	SMA	DIII	DIV	S1	S2	P	L	PNS	TH L
1	Dinas Pangan dan Pertanian	-	-	17	1	-	37	3	32	26	40	24
2	UPT PPI	-	-	8	-	-	4	-	4	10	3	9
3	UPT Puskesmas	1	2	8	-	-	5	-	2	14	6	10
4	UPT RPH	1	1	6	1	-	2	-	3	8	3	8
Jumlah		3	3	39	2	-	48	3	40	58	52	46

Sumber: Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2018 - 2023

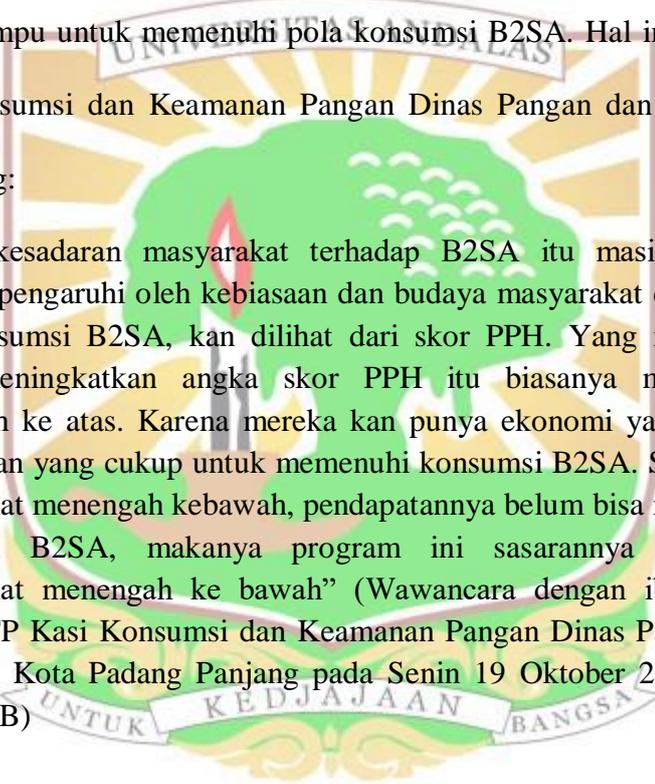
Tidak hanya pada sumber daya manusia, namun peneliti juga menemukan fenomena adanya kendala pada sumber daya non manusia. Kendala tersebut pada sumber daya finansial pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Adanya keterbatasan anggaran pada program akan membuat Dinas Pangan dan Pertanian kesulitan untuk menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan program. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

“Kendala program selain dari masyarakat juga ada kendala finansial atau anggaran. Contohnya saja untuk kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah, tidak ada dana pelaksanaannya untuk tahun 2021 karena dampak dari adanya pandemi...” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni, S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui masalah anggaran menjadi masalah yang sulit untuk dihindari. Adanya dampak dari pandemi COVID 19, mengakibatkan adanya pemangkasan dana untuk Program Peningkatan Ketahanan

Pangan. Sehingga untuk kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah tidak memiliki dana pada tahun 2021 nanti.

Kemudian Van Meter & Van Horn juga mempertimbangkan faktor Kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik terhadap keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dalam hal ini peneliti menemukan fenomena yang ada dilapangan dimana kondisi sosial masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya konsumsi yang tidak sesuai dengan pola konsumsi B2SA, serta kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi pola konsumsi B2SA. Hal ini juga disetujui oleh Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:



“Untuk kesadaran masyarakat terhadap B2SA itu masih rendah, karena dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya masyarakat dan Untuk pola konsumsi B2SA, kan dilihat dari skor PPH. Yang membantu untuk meningkatkan angka skor PPH itu biasanya masyarakat menengah ke atas. Karena mereka kan punya ekonomi yang cukup, pendapatan yang cukup untuk memenuhi konsumsi B2SA. Sedangkan masyarakat menengah kebawah, pendapatannya belum bisa memenuhi konsumsi B2SA, makanya program ini sasarannya lebih ke masyarakat menengah ke bawah” (Wawancara dengan ibu Nelvia Zulni, S.TP Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Senin 19 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat kondisi ekonomi masyarakat menengah keatas yang mampu memenuhi pola konsumsi B2SA sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pola konsumsi yang B2SA. Hal ini dikarenakan rendahnya pendapatan masyarakat menengah ke bawah yang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memenuhi pola konsumsi B2SA yang nantinya menghambat keberhasilan program. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Van Meter & Van Horn yang

mana variabel yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Tidak hanya pada kondisi ekonomi dan sosial saja, pada kondisi politik peneliti juga menemukan fenomena yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Sesuai dengan yang yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana pelaksanaan suatu kebijakan akan mengalami kesulitan jika kondisi politik di wilayah pelaksanaan kurang mendukung. Dalam hal ini, Dinas Pangan dan Pertanian mengalami permasalahan dari kondisi politik dimana adanya kelompok elit yang mengganggu kestabilan pelaksanaan program. Hal ini disampaikan oleh Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:

“Terkadang ada wakil rakyat yang memberikan janjinya kepada masyarakat terkait bantuan dana tetapi malah menuntut kepada dinas untuk memberikan dana kepada kelompok tersebut, sedangkan kelompok tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan bantuan dan dana untuk kelompok sangat terbatas..” (Wawancara dengan Bapak Nasrul, Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Rabu 21 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dilihat, kondisi politik juga mempengaruhi pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Adanya tuntutan dari wakil rakyat kepada Dinas Pangan dan Pertanian menjadi salah satu kendala pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan. Melihat fenomena yang telah disampaikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai bagaimana Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn. Sebab teori ini sesuai dengan permasalahan yang peneliti kaji serta fenomena-fenomena yang peneliti temukan sesuai dengan variabel yang ada pada teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu “Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, khususnya dalam kajian tentang Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Sebagai media pembelajaran dan juga untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terhadap teori implementasi program Peningkatan Ketahanan Pangan



b. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan terhadap pihak Pemerintah Kota Padang Panjang terutama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

c. Untuk peneliti lain

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

